

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Halim, Ridwan, 1990, *Hak Milik, Kondominium, Rumah Susun*, Puncak Karma, Jakarta.
- Hamzah, Andi Dan I Wayan Sudra, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, CV Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S., 2005, *Perlindungan Pemilikan Tanah Dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional Dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S., 2007, *Condominiuim Dan Permasalahannya*, Edisi Revisi, Cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Univ. Indonesia, Jakarta.
- Kuntjoroningrat, 1929, *Kebudayaan Metalitet dan Pembangunan*, PT Gramedia, Jakarta.
- Koeswoyo, Imam, 2004, *Hukum Rumah Susun, Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Edisi Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting Oleh Philupus M. Hadjon Yundika, Yuridika, Surabaya.
- North, 1990, *Dalam Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Salim, Emil, 1986, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES.
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, PT Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Publik*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian 2012, *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*, Cet. 2, PT Sinar Grafika, Jakarta

Siagaan, Sondang P., 1990, *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi Dan Strategi*, PT Gunung Agung, Jakarta.

B. Makalah

Basah, Sjachran, 1995. “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, Surabaya: *Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Lingkungan Di Fakultas Hukum UNAIR*.

Manan, Bagir, 1995. “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD1945”, Jakarta: Makalah Tidak Dipublikasikan.

C. Jurnal/Artikel/Tugas Akhir-Skripsi-Tesis-Disertasi

Batubara, Cosmas, 1985, “Keterangan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Rumah Susun”, *Varia Peradilan* 3, Desember.

Harahap, Lina Rahmasari, 2011, “Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Apartemen Setiabudi Residences”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta.

Saputra, Hari Sarjana, 2014, “Penegakan Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nawawi, H. Hadari, 2005 dan H. Mimi Martini, “Metodologi Penelitian, Penelitian Terapan”, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Saputra, Haris Surya, 2016, “Kebutuhan Peraturan Daerah Ataupun Peraturan Kepala Daerah Yang Mengatur Tentang Rumah Susun Terait Dengan Penerbitan Sertifikat Hal Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Rumah Susun (Studi Kasus Kepailitan PT. Saphir Yogya Super Mall)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372).

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor. 28 Th 2002 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tahapan Pemberian Izin. (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri D).

Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40)

E. Internet

[Caninditaarum](#), “Apartemen Utara, Tanpa Izin tapi Pembangunan Jalan Terus”, <http://liputan.tersapa.com>, diakses tanggal 3 oktober 2015

HMI Komisariat Hukum UGM, “Pers Rilis Diskusi Sore Tentang Pembangunan Hotel Dan Apartemen Di Yogyakarta”, <http://www.hmihukumugm.org>, diakses tanggal 3 Oktober 2015

Elanto Wijoyo, “Kasus Apartemen Utara, Warga Tak Pernah Tinggal Diam!” <https://elantowow.wordpress.com>, diakses tanggal 3 Februari 2015.

<http://tolakapartemenuttara.tumblr.com/>

<http://uttaratheicon.com/>

<Http://Www.Bpmppt.Slemankab.Go.Id>